



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAKHTIYAR EFENDI
2. Jabatan : KEPALA BIRO SEKRETARIAT PERUSAHAAN
3. NHK : 793555

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 255.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI TUCSON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 312.553.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.635.085.521

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 8.852.638.521

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.852.638.521



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.